

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional.(Mokamat, 2009 : 2).

Pada saat ini pemerintah daerah sedang gencar dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sektor baik dari badan usaha milik daerah (BUMD) serta melalui retribusi/ pajak perorangan maupun badan usaha. Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang dimana juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, pemerintah terus melakukan upaya dalam merealisasikan penerimaan pajak kendaraan bermotor, salah satu upayanya adalah dengan cara mengedukasi dan menginformasikan terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan serta pembangunan daerah, akan tetapi ada beberapa masalah dalam penerapan hal tersebut, salah satu contohnya dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang masih manual/*offline* di kantor samsat yang

tidak kita pungkiri juga bahwa pelayanan di setiap kantor berbeda-beda ada yang memiliki pelayanan cepat dan ada juga yang lambat sehingga kerap kali sehingga membuat masyarakat harus mengantri dan di nilai membuang waktu.

Berdasarkan peraturan presiden no 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor yang berbunyi pada pasal 16 ayat 1 tentang Pelayanan yang di berikan kantor Samsat seperti regident ranmor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dan pembayaran SWDKLLAJ dapat melalui petugas yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik.

Di era digital seperti pada saat ini banyak masyarakat yang sudah bisa menggunakan kemajuan teknologi seperti internet karna di nilai memudahkan masyarakat dalam berbagai hal, maka dari itu pemerintah di tuntutan untuk mampu berinovasi dan transformasi mengikuti perkembangan zaman. Untuk menjawab permasalahan tersebut pemerintah membuat suatu program bernama “Samsat Online Nasional (SAMOLNAS)”.

Samsat Online Nasional adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara Nasional melalui aplikasi layanan *mobile*. Program ini

bertujuan untuk mempermudah serta meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lebih mudah serta menghindari calo.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, salah satu contohnya ada di provinsi Kalimantan Tengah. Menurut data yang di peroleh dari MMC DISKOMINFO provinsi Kalimantan Tengah bahwa Penyumbang kontribusi terbesar diantaranya adalah dari hasil pajak kendaraan bermotor, terjadi capaian sebesar 108%, kemudian pajak bahan bakar terjadi kenaikan sebesar 145% dengan surplus 573 Milyar. lebih lanjut disampaikan, target pendapatan daerah tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup besar dari 4,4 T di tahun 2018 menjadi 5,1 T di tahun 2019 dengan peningkatan sebesar 733 Milyar atau 16,8%.” (<https://mmc.kalteng.go.id/>).

Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu pelaksana program “SAMOLNAS” yang diharap dapat mempermudah masyarakat kalimantan tengah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, program ini bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah sebagai salah satu sarana pembayaran pajak kendaraan, dalam hal ini pemerintah provinsi mengharapkan adanya minat serta kesadaran masyarakat kalimantan tengah dalam membayar pajak.

Akan tetapi dari program “SAMOLNAS” ini masih perlu di pertanyakan terkait realisasi/pelaksanaan dari program ini, karna tidak

menutup kemungkinan akan terjadi kendala di dalam pelaksanaannya. Perlu di ketahui juga bahwa program ini berbasis aplikasi yang terhubung dengan internet, yang dimana segmentasi dari pengguna internet belum tentu bisa digunakan oleh semua kalangan, oleh karna itu program ini di khawatirkan hanya bisa di gunakan oleh kalangan tertentu saja, padahal program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan harapan masyarakat mau membayar pajak kendaraan bermotor guna semakin meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan latar belakang tersebut peneliti ingin melihat apakah program *E-SAMSAT/SAMOLNAS* bisa membantu masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan. Maka peneliti memili judul **“PELAKSANAAN *E-SAMSAT* DALAM MENGURUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Samolnas Berdasarkan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di angkat adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *E-SAMSAT* dalam mengurus pajak kendaraan di kantor samsat kota Palangka Raya ?
2. Faktor-faktor pendukung dan peng hambat dalam pelaksanaan *E-SAMSAT* di kota Palangka Raya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penggunaan *E-SAMSAT* di masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan bermotor di kota Palangka Raya.
2. Penelitian ini bertujuan mengetahui permasalahan apa yang di hadapi dalam pelaksanaan *E-SAMSAT* di kota Palangka Raya.

1.4. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat dan Kegunaan Akademis

Penelitian ini sebagai penambah referensi dan rujukan bagi penelitian dengan tema yang sama yaitu tentang pelaksanaan *E-SAMSAT* dalam mengurus pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat dan Kegunaan Praktis

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan informasi tentang optimalisasi pelaksanaan *E-SAMSAT* sebagai salah satu program pemerintah.